

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- A'an Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Fatmawati, *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta, 2012
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2017
- , *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Dian Rakyat, 1998
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Ni'Matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Otje Salman, *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

## **B. Jurnal**

- A Rosyid Al Atok, *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*, Tulisan Ilmiah Dalam Kajian Rutin Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Jumat 22 april 2016
- Arifin Tambunan, *Fungsi DPR Menurut UUD 1945*, *Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer*, 1998
- Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016
- Fitria, *Penguatan Fungsi DPR Melalui Perubahan UU. No 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, No.1, Juni 2014
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3, September 2014

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*

May Lim Charity, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, September 2017

Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016

-----, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR, Perbandingan Antara Era Orde Baru dan Era Reformasi*, Jurnal Integralistik No. 1 Tahun 2018

Syukron Jazuly, *Independen Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi RIS Menjadi UUDS RI

Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket DPR

Undang-Undang No.10 Tahun 1966 Tentang Penyesuaian Ruang Lingkup Kerja DPR-GR

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK

#### D. Media

[https://saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=301:tim-investigasi-paparkan-dugaan-suap-di-mk&catid=20:berita&Itemid=9](https://saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=301:tim-investigasi-paparkan-dugaan-suap-di-mk&catid=20:berita&Itemid=9),

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/576-mengelola-hubungan-presiden-dpr.html>,

<http://yusril.ihzamahendra.com/2008/06/29/sekitar-hak-angket-dpr-tentang-bbm/>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/16083891/empat.mahasiswa.ajukan.uji.materi.ke.mk.terkait.hak.angket.dpr>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4>.

<https://news.detik.com/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini/1>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>

